

Per 99/05  
Les  
a

# SKRIPSI

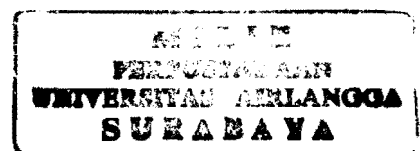
## ASPEK PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA BISNIS YANG TIMBUL AKIBAT TRANSAKSI *E-COMMERCE*



**ABRAM LESMANA**

**030015097**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



# **ASPEK PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA BISNIS YANG TIMBUL AKIBAT TRANSAKSI E-COMMERCE**

## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
PERSYARATAN GUNA MENYELESAIKAN PROGRAM STRATA - I  
DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

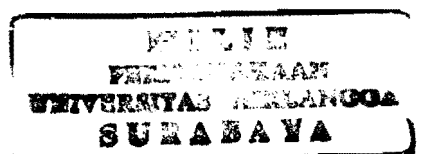
**Dosen Pembimbing**

  
**Y. Sogar Simamora, S.H, M.Hum**  
**NIP. 131570342**

**Penyusun,**

  
**Abram Lesmana**  
**NIM. 030015097**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a) Dokumen elektronik yang digunakan dalam transaksi e-commerce dapat menggantikan peran akta dibawah tangan karena memenuhi unsur-unsur akta dibawah tangan yang ditetapkan undang-undang. Dengan adanya sifat *non repudiation* yang dimiliki oleh teknologi tanda tangan digital yang dibubuhkan pada akta elektronik maka berdasarkan pasal 1875 BW, akta elektronik mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik.
- b) Tanda tangan digital merupakan suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Seperti tanda tangan biasa, tanda tangan digital juga menyatakan keterlibatan seseorang terhadap dokumen yang mereka kirim. Dan yang lebih penting tanda tangan digital dapat memberikan jaminan keaslian dokumen yang dikirimkan secara digital, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari dokumen tersebut, hal ini dilakukan dengan teknologi kriptografi dan fungsi hash yang dimiliki oleh tanda tangan digital. Oleh karena tanda tangan digital ini mempunyai fungsi yang sama dengan tanda tangan konvensional yang dipakai selama ini maka tidak ada alasan menolak keabsahan tanda tangan digital tersebut apabila digunakan dalam transaksi e-commerce.

## 2. Saran.

- a) Pengakuan akta elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan pada masa mendatang tanpa perlu dibuatkan terlebih dahulu print out dari akta elektronik tersebut merupakan suatu hal yang perlu dipikirkan pembuat undang-undang. Karena dengan diakuinya akta elektronik ini sebagai alat bukti di pengadilan diharapkan tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi e-commerce. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memadukan antara teknologi dan hukum. Sistem keamanan yang didapat melalui teknologi hendaknya direspon dengan mengakui keabsahan teknologi tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan pembuktian tersebut untuk lebih menjamin keotentikan sebuah akta elektronik maka perlu juga dipikirkan keberadaan pejabat umum “cyber” yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan legalisasi terhadap akta elektronik tersebut.
- b) Legalitas tanda tangan digital yang digunakan dalam transaksi e-commerce perlu mendapat pengakuan dari segi hukum. Pengakuan keabsahan tanda tangan digital dilakukan bukan tanpa alasan yang jelas, karena pada dasarnya tanda tangan digital mempunyai fungsi dan manfaat yang sama dengan tanda tangan konvensional. Pengakuan tanda tangan digital ini akan menutup satu kekosongan hukum dalam dunia cyber. Untuk mendukung gagasan ini tentu saja diperlukan pembekalan tentang perniagaan elektronik terhadap hakim-hakim, karena dengan memahami teknologi tanda tangan digital maka dalam memutus sengketa, hakim mempunyai argumentasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan



demikian diharapkan hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi yang tidak tertahankan, dan bukan justru sebaliknya menghambat kemajuan teknologi tersebut.

